

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan terkecil dalam sebuah negara yang secara langsung dekat dengan masyarakat yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan di desa adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa dalam bentuk wirausaha dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Untuk mendukung hal tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa dalam bab 2 Pasal 3 disebutkan Pendirian BUMDesa bertujuan untuk: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa (Reza 2016).

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUM Desa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih

produktif dan efektif. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 pada bab 3 Pasal 12 menyatakan bahwa pelaksanaan operasional berwenang: Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, membuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas dan dasar hukum, oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya harus berpedoman pada standar keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak (Rudini, dkk: 2016). Mengingat Standar Akuntansi Keuangan Umum cukup kompleks, usaha kecil seperti BUM Desa akan kesulitan jika mengikut standar tersebut. Maka untuk memudahkan BUMDesa dalam menyusun laporan keuangannya.

Entitas Mikro Kecil dan Menengah adalah Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dengan diterapkan SAK EMKM secara baik dan benar, maka diharapkan laporan keuangan yang disajikan dapat menjadi lebih bermanfaat dan dapat diandalkan bagi para pemakai laporan keuangan. Penyajian SAK EMKM dapat dikatakan wajar apabila laporan posisi keuangan telah tercatat dengan benar serta mencakup lima bagian antara lain neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal disertai catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pandan Makmur dan Tasik Semina Makmur berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. BUM Desa Pandan Makmur bergerak di bidang sarana produksi, perternakan, taman bermain anak-anak, dan unit simpan pinjam. Sedangkan BUMDesa Tasik Semina Makmur

bergerak di bidang unit simpan pinjam, penjualan ATK, event organizer, dan budidaya lobster air tawar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 selaku Direktur BUMDesa Pandan Makmur mengatakan: “ *Laporan Keuangan yang kami buat sebenarnya belum lengkap karena kami hanya membuat 2 laporan saja yaitu laporan Neraca dan laporan Laba Rugi* “ Sedangkan Direktur BUMDesa Tasik Seminaï mengatakan “*Kami masing-masing unit memberikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas BUMDesa dan mereka mengatakan bahwa laporan keuangan yang telah kami susun sudah mencukupi semua informasi yang diperlukan, Laporan yang kami serahkan dari masing-masing unit tersebut berupa laporan neraca dan laporan laba rugi*”. Dari hasil wawancara ini penulis menemukan bahwa BUMDesa di Desa Empang Pandan dalam menyusun laporan keuangannya belum memenuhi Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Sedangkan di BUMDesa Tasik Seminaï Makmur pencatatan laporan keuangannya juga terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan belum memenuhi Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDesa sebaiknya berpedoman pada SAK EMKM, dimana laporan keuangan lengkap yang harus disajikan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta mencerminkan kinerja dari BUMDesa.

Pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jilma Dewi Ayu Nngtyas (2017) pada Penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan standar akuntansi entitas mikro, kecil dan menengah (SAK-EMKM) (Studi kasus di UMKM bintang malam Pekalongan dan Penelitian Muhammad GhufronArdiansyah (2022) yang berjudul Analisis penerapan SAKEMKM pada UMKM nusantara Jaya Agung Bondowoso, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam menerapkan SAK-EMKM masih tidak sesuai dengan standar. Pelaku UMKM hanya mencatatkan pendapatan, kas, dan persediaan. Kendala pelaku UMKM

dalam menerapkan SAK-EMKM yaitu kurangnya ilmu Akuntansi tentang SAK-EMKM dan kurangnya SDM.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa dengan judul **“PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA PANDAN MAKMUR DAN TASIK SEMINAI MAKMUR DI KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan lengkap Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandan Makmur dan Tasik Seminai Makmur di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?
2. Apa saja kendala dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandan Makmur dan Tasik Seminai Makmur di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dibatasi dengan penerapan akuntansi yang berfokus pada Penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pada penyajian BUMDesa di Desa Pandan Makmur dan Tasik Seminai Makmur Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro Kecil Menengah.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandan Makmur dan Tasik Semina Makmur Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis Penerapan SAK- EMKM pada Badan Usaha Milik Desa yang harapannya bisa menambah literatur untuk penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang penulis dapat selama masa perkuliahan dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Sarjana pada Politeknik Negeri Bengkalis.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan untuk melakukan penelitian dalam bidang Analisis Penerapan SAK- EMKM pada Badan Usaha Milik Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, teknik pengelolaan data, metode analisis data, jenis penelitian yang telah digunakan.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN